

Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)

P-ISSN: 2722-4929 & E-ISSN: 2722-4945

Published by Postgraduate Program in Public health, Muslim University of Indonesia

Original Research

Open Access

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN COVID 19

**Besse Dwy Ayu Paramitha Dai, Amran Razak, Andi Asrina*

Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia

**Email: mamayyen@gmail.com*

ABSTRAK

Latar Belakang: Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam, mengkaji, dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuasi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bermaksud untuk mengeksplorasi melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu 1 orang informan kunci, 4 orang informan biasa, 4 orang informan pendukung. **Hasil:** Hasil penelitian ini menemukan bahwa latar belakang penerbitan kebijakan bupati kabupaten Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi sebagai upaya untuk menangani penularan penyakit COVID 19 yaitu berasal dari surat edaran KEMENDAGRI dan KEMENKES, Sumber Daya Manusia yang dilibatkan dalam kebijakan Bupati Kabupaten Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu sumber daya manusia, fasilitas khusus meliputi APD, Rumah Sakit dan Laboratorium Patologi Klinik, dan juga surat tugas bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam kebijakan ini, Faktor pendukung dalam kebijakan bupati kabupaten Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yaitu masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, dan juga adanya sanksi-sanksi yang diberikan agar pelaksanaan kebijakan dapat maksimal. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi kebijakan protokol kesehatan kabupaten Wajo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan nasional. Saran bagi pemerintah daerah untuk terus memaksimalkan upaya-upaya yang dianggap mampu menurunkan penularan penyakit COVID 19.

Kata Kunci: *Analisis Implementasi Kebijakan, COVID-19, Protokol Kesehatan*

ABSTRACT

Background: The increasing and uncontrolled transmission of the COVID 19 disease is very worrying so that it must be addressed with regulations from the central and local governments, one of which is the Wajo district government which made policy number 69 of 2020 concerning health protocols during the COVID 19 pandemic. The purpose of this study is to obtain information. in-depth study, review, and analyze local government policies of Wajo Regency number 69 of 2020 concerning health protocols. **Methods:** This study uses a quasi-qualitative method with a phenomenological approach which intends to explore through observation, in-depth interviews and documentation. The informants of this study were 9 people, namely 1 key informant, 4 regular informants, 4 supporting informants. **Result:** The results of this study found that the background of the issuance of the Wajo district regent's policy number 69 of 2020 regarding health protocols during the pandemic as an effort to deal with the transmission of the COVID 19 disease, which comes from the circular letter of the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Health, Human Resources involved in the policies of the Regent of Wajo Regency. number 69 of 2020 concerning health protocols, namely human resources, special facilities including PPE, Hospitals and Clinical Pathology Laboratories, and also a letter of assignment for human resources involved in this policy, supporting factors in the policy of the Wajo district head number 69 of 2020 concerning health protocol, namely people who comply with health protocols, and also the existence of sanctions that are given so that policy implementation can be maximized. **Conclusion:** The conclusion of this study is that the implementation of the Wajo district health protocol policy has gone well and is in accordance with national directives. Suggestions for local governments to continue to maximize efforts that are considered capable of reducing the transmission of the COVID 19 disease.

Keywords: Policy Implementation Analysis, COVID-19, Health Protocol

LATAR BELAKANG

Serangan wabah virus corona atau COVID 19 telah membuat ekonomi global menjadi krisis dan tidak diketahui kapan kebangkitan ekonomi akan kembali, pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara bisa kembali ketika negara tersebut membuat kebijakan yang tepat seperti contoh pemerintah Tiongkok yang memberlakukan lockdown khususnya

provinsi Hubei dengan menutup pabrik-pabrik, menghentikan transportasi umum, dan mewajibkan rakyatnya tinggal dirumah, memang telah melumpuhkan ekonomi namun terbukti mampu mengatasi penyebaran wabah ini kurang dari tiga bulan sehingga pemulihan ekonomi cepat kembali. (1)

Beberapa klaim kesiapan penanganan COVID 19 telah diumumkan pemerintah termasuk kebijakan-kebijakan

yang akan diambil, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dampak penularan COVID 19 pada ekonomi domestik yang patut diapresiasi, meskipun demikian kebijakan tersebut dianggap lemah karena beberapa faktor yang harus segera ditingkatkan seperti transparansi data, kebijakan yang tepat dan independen, komperhensif, serta tidak tergantung kepada pengaruh seseorang atau sesuatu, membangun kepercayaan pada publik serta komunikasi yang efektif merupakan faktor yang bisa memberi perubahan pada pandemi COVID 19 yang sedang mewabah di Indonesia. (2)

Dunia hingga kini masih dihadapkan pada persoalan menyebarnya penyakit COVID 19 hingga saat ini data yang terkonfirmasi Sebanyak 109.718.030 dengan kasus kematian Sebanyak 2.436.409 yang tersebar diseluruh dunia yaitu Amerika Serikat Sebanyak 27.751.851, India Sebanyak 10.915.074, Brazil Sebanyak 9.083.412, Inggris sebanyak 4.041.972, Rusia Sebanyak 4.032.654, Perancis Sebanyak 3.459.859, Spanyol Sebanyak 3.034.902, Italia Sebanyak 2.721.012, Turki Sebanyak 2.596.870, Jerman Sebanyak 2.343.056, dan Kolombia Sebanyak 2.226.712, banyaknya negara yang masih belum bisa mengendalikan wabah karena kebijakan

yang dianggap dilematis karena akan berdampak pada sektor ekonomi dimana apabila kebijakan tersebut berbasis pada kesehatan maka akan mematikan ekonomi sebuah negara begitupun sebaliknya. (3)

Negara Republik Indonesia adalah Negara dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia, respon pemerintah terhadap krisis sangat lamban danberpotensi menjadi epicentrum dunia setelah Wuhan, kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia, sampai saat ini jumlah kasus COVID 19 mencapai 1.225.765 dengan beberapa provinsi dengan jumlah penderita tertinggi diantaranya yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 316 ribu, Jawa Barat sebanyak 175 ribu, Jawa Tengah sebanyak 141 ribu, Jawa Timur sebanyak 122 ribu dan Sulawesi Selatan sebanyak 52.480 kasus, semakin bertambahnya jumlah kasus di Republik Indonesia karena banyak terjadi orientasi kebijakan yang berbeda antara pemerintah dan publik terutama dalam proses formulasi kebijakan, kebijakan yang selama ini digunakan oleh pemerintah hanya mengedepankan sistem politik tanpa mempertimbangkan aspek kesehatan yang menjadi penyebab terjadinya wabah, jadi kesuksesan pemerintah untuk mengendalikan wabah

tergantung pada kebijakan yang ditetapkan. (4)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2020) dampak negatif kebijakan COVID 19 yang lambat dan tidak dianalisis secara tepat yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi, jika tidak ada kegiatan ekonomi secara baik maka indikator ekonomi akan mengalami dampak negatif akibat perlambatan yang cukup signifikan, kemudian rentan terpapar kepanikan pasar keuangan global, disinilah dampak corona akan terasa langsung pada aspek perekonomian negara yang diakibatkan penentu kebijakan yang lambat mengambil keputusan seperti pada negara Iran dan Amerika Serikat. (5)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur S (2020) menemukan bahwa perlu adanya sumber daya manusia yang khusus untuk menghadapi pandemi COVID 19 karena perlu adanya peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan kerja sama lintas sektor, tidak tersedianya sumber daya manusia sebagai eksekutor menanggulangi COVID 19 mengakibatkan kebijakan yang ada tidak berjalan secara optimal dan akan membuat pandemi ini tidak selesai. (6)

Menurut Purnomo (2015) mengatakan bahwa kebijakan yang telah

dirumuskan dan dibentuk dalam peraturan daerah baik dalam tingkat kabupaten / kota selalu menimbulkan pro dan kontra, adanya saran dan prasarana sebagai faktor pendukung dari kebijakan yang telah dibentuk menjadi kekuatan pemerintah untuk menegakkan peraturan dan sebagai bukti pemerintah serius untuk menangani masalah terkait dengan kebijakan yang telah dibentuk. (7)

Kebijakan sebagai upaya tanggap COVID 19 pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan yang bernama TRISULA (pelacakan sampel secara massif, pengujian secara menyeluruh, dan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan), kebijakan ini diharapkan dapat memutus rantai penularan COVID 19, namun kebijakan tersebut justru menambah kasus positif karena bertambahnya jumlah pemeriksaan sampel swab dan tracing yang dilakukan di provinsi Sulawesi Selatan karena kebijakan ini hanya berfokus pada penderita yang memiliki gejala, data kabupaten/kota yang terkonfirmasi pasien positif Covid 19 tertinggi ada pada Kota Makassar sebanyak 1877 pasien yang dirawat dan 235 meninggal dunia kemudian Kabupaten Gowa dengan jumlah pasien yang dirawat sebanyak 324 pasien dan 21 meninggal dunia, Kabupaten Luwu Timur

sebanyak 115 pasien dirawat dan 3 orang meninggal dunia, Kabupaten Jeneponto sebanyak 19 pasien dirawat dan 3 korban yang meninggal dunia, Kabupaten Maros sebanyak 72 pasien dirawat dan 3 orang meninggal dunia. (8)

Pemerintah kabupaten Wajo melalui peraturan bupati Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi sebagai upaya untuk menangani penularan penyakit COVID 19 berharap mampu mengurangi jumlah kasus COVID 19, dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir bisa membuat masyarakat terhindar dari paparan virus COVID 19 namun sampai saat ini total kasus konfirmasi di Kabupaten Wajo masih belum berkurang bahkan cenderung bertambah sampai pada februari 2021 total kasus yang ada di Kabupaten Wajo sebanyak 400 kasus, ibarat fenomena gunung es kasus tersebut hanya diambil dari tracking masyarakat yang berobat di rumah sakit namun masyarakat yang enggan untuk memeriksakan dirinya di rumah sakit walaupun sudah memiliki gejala lebih banyak lagi, hal ini karena kurangnya keseriusan pemerintah mengeluarkan kebijakan berbasis

kesehatan karena lebih berfokus pada kebijakan yang bersifat politik. (9)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam, mengkaji dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo yaitu peraturan bupati Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi sebagai upaya untuk menangani penularan penyakit COVID 19

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuasi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bermaksud untuk mengeksplorasi melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam penanganan COVID 19.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 – 13 Januari 2021 di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan *indept interview* kepada para informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Wajo yaitu peraturan bupati Wajo nomor 69 tahun

2020 tentang protokol kesehatan dalam masa pandemi sebagai upaya untuk menangani penularan penyakit COVID 19

a. Karakteristik Informan

Tabel 5.1. Karakteristik Informan

N o	Inis ial/ kod e info rma n	U mu r (ta hu n)	Pend idika n	Pekerjaan	Masa kerja	Keterangan
1	AM	50	S3	Bupati Wajo	3 tahun	Informan Kunci
2	LS	48	S2	Kepala bidang kesehatan masyarakat	27 tahun	Informan biasa
3	AS	46	S2	Kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular	16 tahun	Informan biasa
4	CA	38	S1	Kepala bidang pelayanan kesehatan	12 tahun	Informan biasa
5	SM	53	S1	Kepala seksi kefarmasian	32 tahun	Informan biasa
6	MD	25	SM A	Satpol Pamong Praja	4 tahun	Informan pendukung
7	SA	25	SM A	Satpol Pamong Praja	3 tahun	Informan pendukung
8	AM	28	SM A	Satpol Pamong Praja	3 tahun	Informan pendukung
9	MH	38	S1	Kesra Kecamatan Tempe	3 tahun	Informan pendukung

Sumber: Data Primer 2021

Kebijakan

Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan saja namun sektor ekonomi juga berdampak maka dari itu diperlukan kebijakan yang mengatur tentang protokol kesehatan agar masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya diluar rumah dapat

merasa aman ketika bekerja, melalui keresahan ini maka pemerintah kabupaten Wajo membuat kebijakan nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan yang meliputi kebiasaan baru masyarakat ketika berada diluar rumah.

Analisis kebijakan penerbitan peraturan bupati Wajo nomor 69 tahun

2020 tentang protokol kesehatan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang merupakan Kepala Daerah selaku pejabat pembuat kebijakan.

Kebijakan protokol kesehatan dirumuskan oleh pemerintah daerah kabupaten Wajo karena semakin melonjaknya penderita COVID 19 di Kabupaten Wajo sebagai upaya untuk mengurangi penularan maka dirumuskanlah kebijakan protokol kesehatan agar masyarakat dapat terlindungi karena banyaknya penderita penyakit yang tidak memiliki gejala.

Sebagai salah satu solusi dalam mengurangi penularan penyakit kebijakan ini dirumuskan sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat dan juga perlu memperhatikan perekonomian masyarakat, seperti yang dikatakan pada kutipan wawancara berikut:

“latar belakang dibentuknya kebijakan ini karena berdasarkan surat edaran dari Mendagri, Menkes sejak maret sehingga kita bergerak melakukan pembentukan Satgas Tim Gugus Covid-19, dengan mengingat begitu pentingnya perekonomian masyarakat yang tidak boleh surut sehingga diaturlah protokol

kesehatan supaya ada regulasi yang mengatur“

(AM, 50 Tahun wawancara 15 januari 2021)

Keseriusan pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan ditandai dengan adanya kebijakan pemerintah pusat sebagai dasar hukum perumusan kebijakan tersebut, seperti kutipan wawancara berikut:

“kalau kita melihat peraturan yang menjadi dasar pembuatan kebijakan ini semua sesuai dengan aturan yaitu mengambil dasar dari Undang-Undang Dasar dan juga beberapa keputusan baik itu presiden, menteri, ataupun gubernur yang menjadi dasar kita untuk membuat kebijakan tertentu jadi ada sistem yang terbangun walaupun kita di daerah membentuk kebijakan yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat”

(AM, 50 Tahun wawancara 15 Januari 2021)

Adanya aturan yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti yang dikatakan pada hasil wawancara berikut:

“pastinya agar penularan penyakit dapat diputus dan tidak menyebar di Kabupaten Wajo, dan bukan hanya saya yang menginginkan seperti itu tapi pasti setiap

daerah menginginkannya, maka melalui kebijakan no 69 tahun 2020 ini kita berharap rantai penularan penyakit dapat diputus dan kita bisa beraktifitas sebagaimana biasanya ”

(AM , 50 Tahun wawancara 15 Januari 2021)

Adanya harapan dalam pelaksanaan kebijakan sebagai upaya untuk mengendalikan penyakit COVID 19 dari informan hal ini bisa dilihat pada hasil wawancara sebagai berikut:

“semua yang kita lakukan hanya sekedar usaha, yang bisa memutuskan berhasil atau tidaknya itu Allah yang tentukan, tapi setidaknya dengan adanya kebijakan yang saya buat ini akan memberikan sedikit perubahan dari pada kita tidak melakukan sama sekali, karena hampir semua daerah melakukan atau memutuskan untuk membuat kebijakan protokol kesehatan karena hanya ini usaha yang bisa dilakukan sambil menunggu upaya lainnya dari pemerintah pusat”

(AM, 50 Tahun wawancara 15 Januari 2021)

Kebijakan yang telah dibuat mengatur kesemua kalangan seperti yang dikatakan pada kutipan wawancara berikut:

“semua kalangan diatur dalam kebijakan

tanpa terkecuali karena penularan penyakit tidak melihat siapa-siapa jadi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan juga harus ditaati oleh semua kalangan karena ini penyakit sangatlah berbahaya dan penularannya cepat kalau tidak menerapkan protokol kesehatan maka akan semakin cepat dan besar penularan penyakit”

(AM, 50 Tahun wawancara 15 Januari 2021)

Sumber daya yang bisa membantu pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan peraturan bupati no. 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan meliputi beberapa materi seperti fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga keamanan dan ketertiban masyarakat hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ada, sumber daya yang bisa membantu diantaranya ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan laboratorium patologi klinik, dan juga petugas yang bisa memberikan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, dan itu semua kita sudah persiapkan karena sudah dikoordinasikan”

(AM, 50 Tahun wawancara 15 Januari 2021)

Ada sumber daya yang diberikan dari pihak pemerintah dan swasta agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

“ada beberapa bantuan dari pemerintah provinsi yaitu berupa APD dan juga masker, kalau dari pemerintah pusat itu khusus ke tenaga pelaksananya yang berupa insentif”

(AM , 50 Tahun wawancara 15 januari 2021)

Setiap kebijakan pasti memiliki kendala dalam pelaksanaannya, seperti kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Wajo yang tidak terlepas dari adanya kendala dalam pelaksanaannya yaitu kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, keterbatasan anggaran, fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan masih kurangnya sarana dan prasarana.

“kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, keterbatasan anggaran, fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan masih kurangnya sarana dan prasarana”

(AM , 50 Tahun wawancara 15 januari 2021)

Jika melihat terlaksana atau tidaknya kebijakan bisa dilihat pada

respon masyarakat terhadap kebijakan ini seperti yang bisa dilihat pada kutipan wawancara berikut ini:

“berbagai macam respon masyarakat kalau ada kebijakan, ada yang pro dan ada yang kontra, tapi untuk kebijakan ini banyak yang pro setelah diberikan edukasi, jadi memang kebijakan apabila telah disosialisasikan itu akan mudah diterima oleh masyarakat”

(AM , 50 Tahun wawancara 15 Januari 2021)

PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Kebijakan

Latar Belakang Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya latar belakang yang mendasari pembentukan kebijakan bupati Kabupaten Wajo nomor 69 tahun 2020 tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID 19 di Kabupaten Wajo, kebijakan itu meliputi pembatasan kegiatan diluar rumah dengan cara menetapkan aturan bekerja dan beraktivitas dari rumah, menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun setelah menyentuh benda di fasilitas umum, dan menjaga jarak aman ketika berada dikerumunan massa.

Menurut Arum R (2020) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan - kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan atas usulan dari seseorang atau sekelompok orang, karena terdapat hambatan yang harus diatasi untuk dapat mencapai sesuatu tujuan tertentu, serta mencari peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. (10)

Berdasarkan hasil penelitian ini muncul beberapa tema dalam kebijakan protokol kesehatan yaitu latar belakang terbitnya kebijakan ini merupakan hasil koordinasi tim SATGAS COVID 19 yang dibentuk karena adanya surat edaran MENDAGRI dan MENKES yang memberikan instruksi bahwa perlunya membentuk satgas sebagai pelaksana pencegahan dan penanganan penyakit COVID 19, maka setelah satgas covid 19 dibentuk dirumuskanlah beberapa kebijakan diantaranya protokol kesehatan dimana kebijakan ini tujuannya untuk memutus rantai penularan penyakit di masyarakat karena sifat penyakit yang menular

dengan sangat cepat dan juga *airborne disease* atau penyakit yang menular melalui udara sehingga apabila protokol kesehatan tidak dilakukan maka penularan penyakit akan semakin cepat selain itu kebijakan protokol kesehatan ini bertujuan untuk melindungi pola mobilisasi masyarakat didalam kabupaten Wajo karena hanya dengan mematuhi protokol kesehatan masyarakat mampu beraktifitas lagi diluar rumah tanpa adanya kebijakan PSBB di keluarkan oleh pemerintah jadi perekonomian masyarakat tetap berjalan normal tanpa adanya ketakutan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrotunnimah (2020) yang menemukan bahwa kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah memanglah harus memperhatikan dampak yang ditimbulkannya, jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang justru merugikan masyarakat, kebijakan untuk membatasi kegiatan sosial haruslah menjadi kebijakan yang terbaik untuk semua masyarakat karena ini salah satu cara untuk memutus rantai penularan penyakit

dari pada harus melakukan lockdown pada sebuah daerah. (11)

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh A (2020) dan juga menemukan bahwa kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu membentuk Satgas COVID 19 sebagai upaya untuk menangani dan mencegah penularan penyakit selain itu ada upaya pemerintah pusat dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat terhadap penanganan penyakit COVID 19. (12)

Hasil penelitian ini juga dikuatkan dengan teori yang dikemukakan oleh Ayuningtyas (2018) yang mengatakan bahwa suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus di implementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta di evaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. (13)

Berdasarkan analisa peneliti bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten

Wajo merupakan kebijakan yang diadaptasi dari pemerintah Republik Indonesia berdasarkan surat edaran kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan tentang pembentukan tim Satgas COVID 19 yang bertugas untuk menangani dan mencegah penularan penyakit kemudian dibuatlah kebijakan protokol kesehatan yang menerapkan bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, beribadah dirumah, dan juga membatasi kerumunan di pusat keramaian seperti pasar atau tempat wisata yang ada di Kabupaten Wajo.

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian adalah adanya fasilitas dan juga sarana dan prasarana yang diberikan untuk mendukung terlaksananya kebijakan pada masyarakat yang meliputi fasilitas kesehatan, tanda pengenal, dan juga kepastian hukum petugas.

2. Sumber Daya

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina B (2020) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah selaku penanggung jawab dalam sebuah wilayah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya yang akan membantu mengawasi, melaksanakan, dan

memastikan semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan protap yang berlaku dalam kebijakan yang telah diatur yang meliputi dinas kesehatan, BPBD, TNI/POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana satuan tugas percepatan penanganan penyakit COVID 19. (14)

Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Corbet (2020) yang menemukan bahwa kesiapsiagaan pemerintah menghadapi penularan penyakit COVID 19 dibuktikan dengan mengadakan sumber daya berupa sumber daya manusia, fasilitas khusus seperti laboratorium dan rumah sakit walaupun belum terlalu lengkap untuk menghadapi pandemic, hasil penelitian ini juga dikuatkan dengan teori yang dituliskan oleh DINKES Provinsi DKI Jakarta dalam pedoman RT/RW menanggulangi penyebaran COVID 19 yaitu pemerintah pusat yang memberikan instruksi kepada pemerintah daerah agar membentuk kebijakan untuk menangani penyakit COVID 19 dengan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah berupa fasilitas khusus untuk menangani pandemic (15).

Berdasarkan analisa peneliti bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan meliputi sumber daya manusia, alat pelindung diri, fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit dan laboratorium patologi klinik, dan juga surat tugas untuk sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan protokol kesehatan walaupun dalam pelaksanaannya sumber daya yang dimiliki masih kurang.

3. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukungan tokoh masyarakat dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pemerintah baik secara moril maupun materi.

Terdapat beberapa faktor pendukung pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan yaitu dukungan tokoh masyarakat melalui sosialisasi ke masyarakat tentang kebijakan protokol kesehatan dan memberikan contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan protokol kesehatan selain itu adanya dukungan masyarakat kepada pemerintah yaitu melaksanakan kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,

sosialisasi kebijakan ini dilaksanakan selama 3 bulan setelah dikeluarkannya kemudian melihat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan protokol kesehatan apakah sudah efektif atau tidak dan memberikan sanksi kepada masyarakat apabila tidak melaksanakan protokol kesehatan, selain adanya faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh petugas diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan, kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah untuk membantu melaksanakan kebijakan protokol kesehatan yang berdampak pada kurangnya edukasi dan juga kurangnya fasilitas agar pelaksanaan kebijakan menjadi lancar, selain itu terbatasnya fasilitas dan juga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wajo sehingga pelaksanaan kebijakan tidak bisa maksimal.

Hasil penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lacounty (2020) yang menemukan bahwa dukungan

pemerintah terhadap penanganan penyakit COVID 19 ini harus diwujudkan dengan memberikan fasilitas kepada petugas yang berada dilapangan karena dengan memberikan dukungan kepada petugas berupa materi ataupun moral dapat membangkitkan semangat kerja petugas agar lebih bekerja dengan maksimal. (16)

Penelitian ini dikuatkan dengan teori yang dikemukakan WHO (2020) tentang anjuran menggunakan masker yaitu perlu adanya dukungan dari tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga kepatuhan menggunakan masker dapat dimaksimalkan karena tokoh masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. (17)

Faktor pendukung lebih banyak dalam kegiatan operasional dari kebijakan itu seperti sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kebijakan yang telah dibentuk, sumber daya dalam bentuk keuangan dan pendanaan agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. (18)

Dengan adanya faktor pendukung pengendalian administratif dan kebijakan-kebijakan yang

diterapkan meliputi penyediaan infrastruktur dan kegiatan PPI yang berkesinambungan, pembekalan pengetahuan petugas kesehatan, mencegah kepadatan pengunjung di ruang tunggu, menyediakan ruang tunggu khusus untuk orang sakit dan penempatan pasien rawat inap, mengorganisir pelayanan kesehatan agar persediaan perbekalan digunakan dengan benar, prosedur-prosedur dan kebijakan semua aspek kesehatan kerja dengan penekanan pada surveilans dengan mekanisme perbaikan yang diperlukan. (19)

Penggunaan triase klinis di fasilitas layanan kesehatan untuk tujuan identifikasi dini pasien yang mengalami ISPA untuk mencegah transmisi patogen ke tenaga kesehatan dan pasien lain. Dalam rangka memastikan identifikasi awal pasien, fasyankes perlu memperhatikan: daftar pertanyaan skrining, mendorong petugas kesehatan untuk memiliki tingkat kecurigaan klinis yang tinggi, pasang petunjuk-petunjuk di area umum berisi pertanyaan-pertanyaan skrining sindrom agar pasien memberi tahu tenaga kesehatan, algoritma untuk triase,

media KIE mengenai kebersihan pernapasan. (20)

Berdasarkan analisa peneliti bahwa faktor pendukung penanganan COVID 19 yaitu adanya dukungan tokoh masyarakat melalui edukasi kepada masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan dan juga adanya dukungan dari masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak saat berada di kerumunan massa, mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih ketika menyentuh benda di fasilitas umum dan juga meningkatkan imun tubuh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Wajo karena diadaptasi dari pemerintah Republik Indonesia berdasarkan surat edaran kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan tentang pembentukan tim satgas COVID 19 yang bertugas untuk menangani dan mencegah penularan penyakit kemudian

dibuatlah kebijakan protokol kesehatan yang menerapkan bekerja dari rumah, bersekolah dari rumah, beribadah dirumah, dan juga membatasi kerumunan di pusat keramaian seperti pasar atau tempat wisata yang ada di Kabupaten Wajo.

2. Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan meliputi sumber daya manusia, alat pelindung diri, fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit dan laboratorium patologi klinik, dan juga surat tugas untuk sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan protokol kesehatan walaupun dalam pelaksanaannya sumber daya yang dimiliki masih kurang.
3. Faktor pendukung penanganan COVID 19 yaitu adanya dukungan tokoh masyarakat melalui edukasi kepada masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan dan juga adanya dukungan dari masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak saat berada di kerumunan massa, mencuci

tangan menggunakan sabun dan air bersih ketika menyentuh benda di fasilitas umum dan juga meningkatkan imun tubuh.

B. Saran

1. Kebijakan
Kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya dibuat untuk memaksimalkan upaya-upaya agar mempercepat penanganan penyakit COVID 19 mulai dari tahap pencegahan, pencatatan dan juga pengobatan kepada pasien ataupun kontak erat yang memiliki risiko tinggi untuk menularkan penyakit kepada orang lain.
2. Sumber Daya
Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk bencana kesehatan seperti fasilitas laboratorium dan rumah sakit untuk menunjang penanganan pandemi penyakit.
3. Faktor Pendukung
Masyarakat dan tokoh masyarakat yang memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat selain dalam bentuk sosialisasi juga dalam bentuk kepatuhan dalam menjalankan

kebijakan seperti kebijakan protokol kesehatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lisbet, 2020. *Penyebaran Covid 19 dan Respons Internasional*. Bidang Hubungan Internasional Info Singkat Volume XII, Nomor 5
2. Dana, 2020. *Analisis perilaku masyarakat indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona (COVID – 19) dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Volume 7 Nomor 3
3. WHO, 2020. *Materi Komunikasi Risiko COVID 19 untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Materi pencegahan penularan dari pasien ke petugas kesehatan
4. KEMENKES, 2020. *Tanya Jawab Tentang Novel Coronavirus (NCOV)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
5. Yunus, 2020. *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I Volume 7 Nomor 3.
6. Nur S, 2020. *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease*. Bidang Kesejahteraan Sosial Info Singkat Volume XII Nomor 3
7. Purnomo D, 2015. *Analisis Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 3 Nomor 1 Hal. 42-48
8. Gugus Tugas SULSEL. 2020. *Pengenalan Program TRISULA di Sulawesi Selatan*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
9. DINKES Kabupaten Wajo. *Profil Kesehatan Kabupaten Wajo*. Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
10. Arum R, 2020. *Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona di Tinjau dari Sudut Pandang Politik*. Jurnal Lawarxiv Papers
11. Zahrotunnimah, 2020. *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID 19 di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Volume 7 Nomor 3
12. Susilo A, dkk 2020. *Coronavirus Disease 2019*. Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Volume 7 Nomor 1.

13. Ayuningtyas D, 2018. *Analisis Kebijakan Kesehatan (Prinsip dan Aplikasi)* Cetakan Pertama Penerbit: Rajagrafindo Persada: Depok
14. Erlina B dkk, 2020. *Protokol Tatalaksana COVID 19*. Naskah Publikasi Hasil Kerjasama PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, dan IDAI
15. Corbet, 2020. *Evaluation of the mRNA-1273 Vaccine Against SARS-Cov-2 in Nonhuman Primates*. The New England Journal Of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa2024671
16. Lacounty. 2020. *Frequently Asked Questions (FAQs) Novel Coronavirus Disease (COVID 19)*. Los Angeles County Department Of Public Health Volume 24 Nomor 3
17. WHO, 2020. *Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks Covid 19*. Panduan Sementara
18. Moncef, 2020. *Developing Safe and Effective Covid Vaccines-Operation Warp Speed's Strategy and Approach*. The New England Journal Of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMp2027405
19. Murniati D, 2019. *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) Studi Kasus Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso*. The Indonesian Journal of Infectious Disease Volume 4 Nomor1.
20. Pang J, 2020. *Potensial Rapid Diagnostic, Vaccine and Therapeutics For 2019 Novel Coronavirus (2019 – nCoV): A Systematic Review*. Journal Of Clinical Medicine Volume 623 Nomor 1.